

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI SOSIAL TNI UNTUK MENGATASI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH KODAM

Wibisono Poespito Hadi¹, Susilo², Wahyu Wiyani³, Chandra Dinata⁴, Akbar Pandu Dwinugraha⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Merdeka Malang

Correspondent author: wibisonolp2m@gmail.com

Malang, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of the TNI's Social Communication policy in addressing radicalism in the Kodam III/Siliwangi area, focusing on the effectiveness of the programme, available resources, as well as obstacles and solutions encountered in its implementation. The research was conducted using a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews with informants, namely the Assistant Kasdam III/Siliwangi Cq, Operations Assistant and Territorial Assistant, Bakesbangpol Linmas of West Java Province, Regional Office of the Ministry of Religion and Ministry of Law and Human Rights of West Java Province. This research reveals that the implementation of TNI social communication faces challenges in overcoming radicalism, including a lack of understanding of the mechanisms of radicalism and a lack of participation in deradicalisation initiatives initiated by BNPT. Other factors affecting policy implementation are resource considerations such as personnel, equipment, and financial resources. Improving the capability of local command structures and coordination with relevant partners is required to successfully tackle radicalism. Comprehensive awareness of local culture and the creation of Standard Operating Procedures (SOPs) involving all relevant parties in the regions are also important to improve the effective identification and prevention of radicalism.

Keywords: Defence; Indonesian National Army; Policy Implementation; Radicalism; Social communication

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Komunikasi Sosial TNI dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kodam III/Siliwangi, dengan fokus pada efektivitas program, sumber daya yang tersedia, serta kendala dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu para Asisten Kasdam III/Siliwangi Cq, Asisten Operasi dan Asisten Teritorial, Bakesbangpol Linmas Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenag dan Kemenkumham RI Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan komunikasi sosial TNI menghadapi tantangan dalam mengatasi radikalisme, termasuk kurangnya pemahaman tentang mekanisme radikalisme dan kurangnya partisipasi dalam inisiatif deradikalisasi yang diinisiasi oleh BNPT. Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah pertimbangan sumber daya seperti personel, peralatan, dan sumber daya keuangan. Diperlukan peningkatan kemampuan struktur komando daerah dan koordinasi dengan mitra terkait untuk berhasil mengatasi radikalisme. Kesadaran yang komprehensif tentang budaya lokal dan pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang melibatkan semua pihak terkait di daerah juga merupakan hal penting untuk meningkatkan identifikasi dan pencegahan radikalisme secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Komunikasi sosial; Paham radikalisme; Pertahanan; TNI

PENDAHULUAN

Dalam pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sebagai bagian dari entitas dunia internasional, globalisasi disamping memberikan dampak positif dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemudahan dalam mengakses berbagai informasi negara-negara lain juga telah menimbulkan dampak negatif antara lain adalah arus informasi semakin deras dan tidak terkendali (Serafica Gischa, 2020; <https://www.kompas.com>).

Globalisasi dengan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi dari luar telah membawa nilai atau norma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dengan kecenderungan merebaknya sikap Kebarat-baratan, sikap individualisme yang semakin banyak muncul, meningkatnya pola hidup konsumtif, terkikisnya budaya Indonesia dan lunturnya sikap-sikap Ke-Indonesiaan (Muhammad, 2017).

Disamping itu, perang multi dimensional seperti perang proxy war dalam bentuk terorisme dalam beberapa dekade terakhir terus berlangsung termasuk di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis, konflik sosial dalam unjuk rasa, Narkoba dan gaya hidup hedonisme serta tawuran antar pelajar (Wangsajaya, 2023). Saat ini dan di masa yang akan datang, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Pola untuk menguasai ruang sudah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan kekuatan militer, tetapi dilakukan dengan cara-cara non linier, tidak langsung, dan bersifat proxy war (Kemhan RI, 2020:25). Wujud nyata realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan seperti Irak dan Suriah, ISIS di Filipina, dan krisis nuklir di Korut.

Di sisi lain, ada juga tantangan terkait terorisme yang eskalasinya makin meningkat di semua negara, termasuk negara adidaya (Sihalolo, 2017). Pada perkembangan selanjutnya, terorisme juga digunakan sebagai alat pengkodisian wilayah. Beberapa kasus seperti ini di Suriah dan Irak, terorisme terbukti berujung pada proxy war dengan melibatkan berbagai aktor baik aktor negara maupun non negara.

Disisi lain, dalam lingkup regional kawasan Asia Tenggara, semakin memperlihatkan adanya penguatan nilai-nilai nasionalisme, dimana sebagian besar warga negara di negara-negara tersebut memiliki semangat militansi dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat negara dan bangsanya.

Nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara mengalami tantangan dari ancaman radikalisme. Mengingat, Asia Tenggara sebagai suatu kawasan yang beragam, mulai mendapatkan ancaman dari radikalisme agama (Ramli, 2022). Dalam hal ini, proses demokratisasi yang berlangsung di tengah masyarakat terancam oleh pandangan ekstrem trans-nasional sejalan dengan adanya ideologi-ideologi islam trans-nasional seperti di Indonesia, Filipina, Myanmar dan Thailand (Yulianto, 2017).

Apa yang terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara berbanding terbalik dengan yang dihadapi Indonesia, dimana dengan jumlah penduduk yang sangat besar terdiri dari beraneka ragam, suku dan adat istiadat serta budaya memiliki kecenderungan pada semakin meruncingnya gesekan antar suku dan antar pemeluk agama dengan munculnya dikotomi mayoritas dan minoritas (Hamdanah et al., 2022), sehingga keberagaman yang ada belum mampu dikelola dengan baik, sehingga kecenderungan terjadi perpecahan antar kelompok masyarakat agama mayoritas dan minoritas dengan munculnya fenomena kekerasan yang dilakukan kelompok pemeluk agama mayoritas melalui pelarangan kegiatan ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah agama mayoritas oleh kelompok agama minoritas, dan lain sebagainya sehingga mengandung kerawanan semakin mengemukanya potensi disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa yang dapat memperlemah pertahanan menghadapi perang dimensional. Disamping itu, eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah berbangsa dan bernegara dalam beberapa tahun terakhir tengah mendapatkan rongrongan dari berbagai ideologi yang datang dari luar antara lain liberalisme, komunisme yang dikemas dengan gaya baru serta penerapan Khilafah Islamiyah (Ardiyansah, 2017).

Paham radikalisme telah masuk pada kalangan generasi muda yang disebarkan oleh kelompok radikal melalui media sosial, media dakwah/ceramah-ceramah keagamaan, kalangan pesantren yang dalam skala tertentu dapat mengarah pada aksi terorisme. Paham radikalisme dalam skala tertentu merupakan benih dari tumbuhnya aksi terorisme. Penyebaran paham radikalisme dan ideologi radikal atau radikalisme agama ditengah kemajemukan bangsa masih menjadi ancaman serius dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia (Aziz, 2016).

Radikalisme dapat menjadi embrio lahirnya ekstrimisme bahkan terorisme (Ladjima et al., 2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa radikalisme dan terorisme dapat menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia, antara lain terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat, bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, dapat menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa, perekonomian masyarakat yang terhambat sehingga berujung pada timbulnya disintegrasi bangsa.

Kelompok radikal memiliki karakteristik tidak toleran dimana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik yang keliru yakni selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, mengeklusifkan diri yakni membedakan diri/memisahkan diri dengan umat lainnya baik intern maupun ekstern, serta bersikap revolusioner yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka (Anzaikhan et al., 2023).

Adapun media penyebaran paham radikalisme maupun terorisme yakni melalui pendekatan personal yang menysasar keluarga, teman dan orang-orang dekat, melalui forum diskusi seperti kelompok-kelompok kajian, melalui media publikasi yaitu poster, selebaran maupun tabloid, serta melalui internet yaitu melalui website, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, Chanel Youtube, dan lainnya.

Hasil penelitian Siregar et al. (2019) menunjukkan bahwa program Komunikasi Sosial secara teori dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja teritorial, meskipun implementasinya belum optimal dan perlu ditingkatkan. Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS dalam mencegah radikalisme bisa diimplementasikan, tetapi perlu peningkatan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan termasuk memaksimalkan unsur-unsur yang mendukung proses komunikasi.

Penelitian Poespitoahadi et al. (2023) menunjukkan bahwa sinergi antara TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam kebijakan deradikalisasi di Provinsi Jawa Timur belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang menyeluruh, koordinasi yang maksimal dalam pelaksanaan program, dan kerjasama yang memadai antara berbagai lembaga seperti TNI, BNPT, Polri, dan tokoh agama. Ini menyebabkan penyebaran informasi yang tidak efektif, ketidaksamaan dalam pemahaman terhadap masalah, serta ketidakselarasan dalam agenda dan kegiatan antiradikalisasi.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil komunikasi sosial yang belum optimal, oleh sebab itu diharapkan implementasi kebijakan komunikasi sosial TNI di wilayah Kodam III/Siliwangi ini dapat berjalan secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Komunikasi Sosial TNI dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kodam, dengan fokus pada efektivitas program, sumber daya yang tersedia, serta kendala dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaannya.

METODE

Menurut Moleong (2018), penelitian deskriptif (descriptive research) ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Pahleviannur et al., 2022). Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif.

Pendekatan penelitian ini secara spesifik diarahkan pada penggunaan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Peneliti mengangkat fenomena sosial berkembang paham radikalisme. Berawal dari fenomena tersebut peneliti mendeskripsikan bagaimana kebijakan komunikasi sosial TNI dalam mengatasi paham radikalisme, peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu para Asisten Kasdam

III/Siliwangi Cq. Asisten Operasi dan Asisten Teritorial, Bakesbangpol Linmas Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenag RI Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Kemenkumham RI Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan implementasi kebijakan komunikasi sosial TNI dalam mengatasi paham radikalisme ditengah kemajemukan bangsa sehingga akan memberikan kedalaman terhadap hasil penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami implementasi kebijakan, beberapa referensi terkadang digunakan sebagai perbandingan pada instrumen mana sebuah kebijakan itu cocok untuk diadopsi sesuai studi kasus yang ditemukan di wilayah studi penelitian. Seperti Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan terlihat secara umum bagaimana implementasi kebijakan yang dikaji menjawab pertanyaan “apa yang terjadi” dan “bagaimana”. Grindle mengatakan, proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab pertanyaan “mengapa”, dilihat bagaimana interaksi proses implementasi dengan hal-hal yang secara umum menurut Grindle menentukan keberhasilan kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan dengan kajian implementasi model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Markulis, 1985) yang menggunakan enam (6) indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar kebijakan dan tujuan; (2) sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)

Namun untuk kasus penelitian ini, penulis menggunakan pendapat dari teori Edwards III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Komunikasi Sosial TNI di Wilayah Kodam III/Siliwangi Dalam Mengatasi Paham Radikalisme.

Beberapa fenomena awal yang terjadi dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial di wilayah Kodam III/Siliwangi dsalam mengatasi paham radikalisme adalah keterbatasan sumber daya manusia; keterbatasan personel yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas, keterbatasan peralatan untuk mendeteksi dan melacak kegiatan-kegiatan terkait radikalisme dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat serta keterbatasan peralatan untuk mendeteksi dan melacak kegiatan-kegiatan terkait radikalisme yang berpengaruh pada implementasi kebijakan komunikasi sosial. Dalam proses komunikasi diperlukan formulasi diantaranya yaitu pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan dan umpan balik. Dari faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial dalam mengatasi paham radikalisme maka dibutuhkan pemecahan sehingga kebijakan komunikasi sosial yang telah ditetapkan benar-benar dapat diimplementasikan.

Komunikasi.**1) Transmisi (*transmission*).**

Proses transmisi atau penyampaian informasi yang dilakukan aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi kepada kelompok sasaran sudah berjalan dengan baik. Hal ini sudah sesuai dengan harapan dalam Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/508/XII/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Bujuknik Lima Kemampuan Teritorial (Methode). Disebutkan bahwa prajurit TNI AD harus mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat baik yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi antar pribadi, kelompok atau tidak langsung melalui komunikasi masa. Informasi yang disampaikan haruslah informasi yang relevan, berguna, tepat waktu, dan valid. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Upaya ini tentu saja dinilai sangat baik karena konsep dasar melaksanakan pencegahan paham radikalisme yang tergolong Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah bela negara. Kegiatan komunikasi sosial dalam masa damai yang dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan/ceramah dan penerangan secara langsung dan tidak langsung terhadap komponen bangsa agar tidak terpengaruh oleh provokasi, agitasi dan propaganda gerakan aksi terorisme merupakan penyelenggaraan komunikasi sosial untuk mengatasi aksi terorisme pada tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Jadi dengan melaksanakan komunikasi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat diharapkan semua masyarakat dapat bersatu padu melaksanakan bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) khususnya dalam rangka mengatasi paham radikalisme. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek transmisi sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan

faktor komunikasi.

2) Konsistensi (*consistency*).

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan komunikasi telah berjalan dengan konsisten dan hal ini sesuai dengan pentahapan yang ada pada implementasi kebijakan. Konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jika perintah yang dilakukan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Komunikasi sosial yang dilaksanakan pada masa damai memiliki pentahapan kegiatan yang diawali dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Lebih spesifik lagi, pada tahap pelaksanaan komunikasi sosial dalam rangka penyiapan pertahanan negara secara dini meliputi materi pada poin (b) yaitu mewaspadaai terhadap gerakan ekstrim dan radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan bahaya laten Komunis/G 30 SPKI, DI/TII dan NII, teroris, fundamentalis dan paham radikal lainnya dengan cara memberikan penyuluhan, penataran, ceramah, dan dialog. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek konsistensi sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan faktor komunikasi.

3) Kejelasan (*clarity*).

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan komunikasi telah cukup jelas dipahami kelompok sasaran. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Proses komunikasi sangat terbantu dengan adanya transfer informasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi dengan menggunakan bahasa daerah yaitu Sunda cukup memudahkan dalam proses komunikasi karena masyarakat menjadi mudah memahami informasi yang disampaikan. Dalam Bab Pembahasan, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi sosial di lapangan adalah penguasaan bahasa Sunda (Jawa Barat) dan pengenalan serta penghayatan budaya Sunda dinilai belum dipergunakan secara maksimal. Akibatnya, pemahaman kelompok sasaran kurang optimal dan menjadi salah satu faktor kegagalan penerapan komunikasi

sosial. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi interpretasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek kejelasan informasi sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan faktor komunikasi.

Sumber Daya.

1) Sumber daya manusia.

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan kendala dalam sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang belum terpenuhi. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Dimana tidak ada suatu rumus yang pasti tentang berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) yang harus dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah SDM yang harus disediakan oleh suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakannya. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan untuk menjalankan tugas implementasi, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, dalam Bujuknik tentang komunikasi sosial juga disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Komunikasi sosial diantaranya faktor dari dalam yaitu personel. Dijelaskan bahwa tingkat kemampuan prajurit TNI dalam berkomunikasi dengan komponen bangsa akan berpengaruh terhadap pelaksanaan komunikasi sosial secara optimal. Jadi, kualitas sumber daya, dalam hal ini kemampuan prajurit TNI, memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan komunikasi sosial.

Penambahan jumlah personel staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini juga dinyatakan bahwa "probably the most essential resources in implementing policy is staff", di samping itu ia juga menyatakan "no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective." Artinya disini adalah, penguasaan dan keterampilan pelaksana kebijakan komunikasi sosial juga harus mumpuni dan sepadan dengan kelompok sasaran. Kemampuan teritorial harus betul-betul dikuasai oleh aparat komando kewilayahan jajaran

Kodam III/Siliwangi. Namun demikian hal ini belum terpenuhi semuanya sesuai yang diharapkan.

Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia belum dapat terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan faktor sumber daya. Dari segi kualitas, personel komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi masih menghadapi permasalahan kompetensi, yang terlihat dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap/perilaku (*attitudes*). Dari segi kuantitas, jumlah personel masih kurang memadai untuk melaksanakan komunikasi sosial dengan optimal.

2) Sumber daya anggaran.

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya anggaran yang masih kurang terpenuhi. Dalam hal ini, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas sehingga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah dan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya anggaran yang masih kurang terpenuhi sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

3) Sumber daya peralatan.

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya peralatan masih belum terpenuhi. Ketiadaan peralatan ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi sebuah kebijakan antara lain disebabkan oleh kelangkaan teknologi (peralatan) dan SDM yang memiliki kapasitas. Selanjutnya, dalam Bujuknik tentang komunikasi sosial juga disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan komunikasi sosial diantaranya faktor dari dalam yaitu sarana dan prasarana. Dijelaskan bahwa kesiapan sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan komunikasi sosial supaya tidak menghambat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kelengkapan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dimana pola radikal di Indonesia dapat berubah-ubah dari masa ke masa. Dalam melakukan aksinya, di Indonesia, kelompok-kelompok teroris kerap menggunakan berbagai pola mulai dari ancaman, penggunaan zat-zat kimia dan biologi, zat radioaktif dan senjata nuklir (CBRN), pengiriman bom berbentuk paket, penggunaan racun, cyberterrorism, peledakan bom, serangan dengan senjata api dan senjata tajam, pembajakan kendaraan atau pesawat terbang, pembunuhan, penghadangan, penculikan, penyanderaan,

perampokan, sabotase, narcoterrorism, dan bergerak secara individual. Menghadapi ancaman teror yang semakin modern dan dinamis serta fleksibel, maka dibutuhkan perkuatan peralatan yang mampu mendeteksi dini dalam rangka cegah dini aksi terorisme dan radikalisme.

Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya peralatan yang masih kurang terpenuhi sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

4) Sumber daya kewenangan.

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya kewenangan sudah berjalan dengan baik. Hal ini sudah sesuai dengan yang tercantum pada bujuknik komunikasi sosial. Disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan komunikasi sosial disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat, dimulai dari Panglima Kodam, Komandan Korem, Komandan Kodim, Komandan Rayon Militer, yang terakhir Dansat Non Komando Kewilayahan. Selanjutnya Sulila menjelaskan bahwa wewenang ini, akan berbeda-beda baik dari bentuk program maupun pelaksanaannya, serta skill yang dibutuhkan berdasarkan bidang tugas yang ditetapkan dalam batasan wewenang yang diemban. Hal tersebut telah dinyatakan bahwa kewenangan (authority) yang cukup membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melakukan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan sumber daya ditemukan sumber daya kewenangan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan implementasi kebijakan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana.

Implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan disposisi masih ditemukan kendala dalam penempatan birokrasi yang masih kurang terpenuhi. Penempatan personel staf oleh Kodam III/Siliwangi sudah sesuai dengan kondisi ideal. Namun di tingkat Koramil, penempatan babinsa tidak berdasar kriteria tertentu, namun masih disesuaikan dengan jumlah personel yang ada. Hal ini masih belum memenuhi faktor keberhasilan implementasi.

Dilihat dari disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap penampilan yang harus dimiliki komunikator antara lain; a) memiliki integritas, wibawa, dan kredibilitas yang tinggi di mata penerima komunikasi (komunikasikan); b) memiliki daya tarik, dalam arti mampu menggugah semangat,

minat dan perhatian komunikasi terhadap bahan/materi yang disampaikan; c) memiliki sikap etika untuk menghormati hubungan; d) menguasai bahasa yang dimengerti komunikasi. Untuk memenuhi kriteria ini dapat diwujudkan dengan selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada komunikator untuk selalu meningkatkan sikap penampilannya. Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan disposisi pada aspek penempatan birokrasi belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena kekurangan personel sehingga penempatan birokrasi menjadi terbatas.

Struktur Birokrasi.

1) Standard Operational Procedure (SOP).

Standard Operational Procedure (SOP) mengenai komunikasi sosial untuk mengatasi paham radikalisme secara tertulis belum ada. Hal ini tidak sesuai dengan harapan implementasi kebijakan. Dengan adanya Standard Operational Procedure (SOP) ini penting untuk mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. Standard Operational Procedure (SOP) juga memberikan keseragaman dalam tindakan personel dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang baik, serta keadilan dalam pelaksanaan aturan.

Dari beberapa pandangan di atas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan struktur birokrasi pada aspek Standard Operational Procedure (SOP) belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum ada Standard Operational Procedure (SOP) atau prosedur tetap mengenai komunikasi sosial dalam rangka cegah dini dan deteksi dini aksi radikalisme.

2) Fragmentasi.

Fragmentasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini sudah sesuai dengan Bujuknik komunikasi sosial yang selalu menekankan untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Keterlibatan Tiga Pilar yang terdiri dari TNI, Kepolisian dan aparat pemerintah provinsi, yang dijalin dengan koordinasi yang baik sebenarnya sudah cukup tepat dalam menjalankan implementasi kebijakan komunikasi sosial. Selanjutnya tantangan pencegahan terorisme yang sedemikian berat, maka dibutuhkan kerja sama dan koordinasi semua elemen bangsa. Karena itulah dalam Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme tidak hanya diisi pemerintah daerah, melainkan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh Ormas, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh media, hingga tokoh perempuan. Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi sosial berkaitan dengan struktur birokrasi pada aspek fragmentasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan

implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan komunikasi sosial TNI di wilayah Kodam III/Siliwangi dalam mengatasi paham radikalisme tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penanganan paham radikalisme tersebut diperlukan upaya-upaya yaitu: (a) meningkatkan kapabilitas aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi di bidang komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan komunikasi sosial perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki keahlian yang relevan. Kualitas yang dimaksud adalah aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi harus memahami teknik-teknik komunikasi agar pelaksanaan komunikasi sosial dapat berjalan dengan efektif guna mencapai sasaran yang diharapkan. Karena itu, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi perlu mendapatkan pembekalan yang bersifat teknis dari ahli-ahli komunikasi berupa pengetahuan komunikasi sosial, cara mendengar dan menghargai pendapat orang lain serta mampu untuk mempengaruhi orang lain dengan cara-cara akademis. Terlebih lagi jumlah mahasiswa dan civitas akademika sebagai bagian dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Banten jumlahnya cukup banyak. Aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi harus mampu merangkul kalangan akademisi tersebut agar terhindar dari paham-paham radikalisme.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dimanfaatkan oleh aparat Kodim untuk berkomunikasi lebih efektif dan efisien dengan berbagai lapisan masyarakat di wilayahnya; (2) Mengaktifkan kegiatan silaturahmi Tiga Pilar Plus. Silaturahmi digunakan sebagai wahana komunikasi, pusat sosialisasi dan pusat informasi. Dalam kegiatan silaturahmi ini semua orang bisa membicarakan apapun dengan tema apapun. Selain itu, semua kabar dan informasi terbaru atau yang sedang ngetren bisa saja diketahui saat silaturahmi. Kebiasaan cangkruk tersebut bisa dijumpai di resto, cafe, warung-warung, di tempat kerja di saat senggang, di rumah-rumah, di ruang pertemuan, atau di mana saja sejauh orang-orang yang merasa saling cocok untuk mengobrol berada bersama-sama dalam waktu tertentu; Dengan memanfaatkan budaya masyarakat setempat, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi selama ini telah menerapkan komunikasi sosial di wilayah binaannya dengan melaksanakan silaturahmi Tiga Pilar yang melibatkan unsur pemerintah daerah, Polri dan komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi sesuai tingkatannya. Dalam silaturahmi Tiga Pilar ini, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi bersama-sama dengan dua pilar lainnya melaksanakan komunikasi dan koordinasi guna menampung berbagai informasi dan aspirasi yang ada di masyarakat.

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan silaturahmi Tiga Pilar ini maka diharapkan tidak hanya cukup melibatkan tiga pilar saja tetapi juga melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda ataupun tokoh masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menjaring informasi di kalangan masyarakat bawah. Selain itu, tidak hanya dilaksanakan di warung-warung,

restoran, café, rumah-rumah, ataupun ruang pertemuan tetapi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah keagamaan, pesantren, ataupun kampus-kampus. Mengingat keterbatasan waktu masyarakat wilayah perkotaan di siang hari dalam bersosialisasi dan berinteraksi karena kesibukannya, diharapkan silaturahmi Tiga Pilar ini juga diaplikasikan di luar jam kerja maupun jam kerja. Karena itu, silaturahmi Tiga Pilar yang ada saat ini perlu ditingkatkan menjadi silaturahmi Tiga Pilar Plus. Plus disini lebih mencakup pada penambahan subyek yang terlibat, perluasan tempat dan waktu pelaksanaan silaturahmi.

Hal ini tentu akan bermanfaat dan efektif dalam upaya untuk mendeteksi dan mencegah secara dini paham-paham ataupun aksi radikalisme yang ada di masyarakat;

(3) Memperluas peta jarak jaring teritorial. Dilihat dari sumber daya yang penting terdiri dari sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki keahlian terkait yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai yang diharapkan. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam implementasi kebijakan komunikasi sosial adalah personel atau aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi sampai dengan Babinsa yang langsung berperan di lapangan. Jumlah Babinsa di setiap Koramil ditentukan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah desa/kelurahan. Idealnya dalam satu kelurahan terdapat dua orang Babinsa untuk memonitor wilayah binaannya tetapi pada kenyataannya jumlah Babinsa belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, sumber daya peralatan yang dimiliki juga terbatas. Komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi memiliki alat pelacak atau peralatan khusus seperti halnya Polri guna mendeteksi informasi-informasi negatif yang beredar di masyarakat. Keterbatasan jumlah aparat dan peralatan tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan komunikasi sosial di wilayah sehingga komunikasi antara aparat kewilayahan, aparat pemerintah daerah maupun komponen masyarakat lainnya, akan mengalami hambatan. Hal ini berpengaruh negatif terhadap upaya mengatasi aksi radikalisme di wilayah. Untuk dapat mengatasi keterbatasan jumlah personel dan peralatan tersebut, maka aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi harus bisa memperluas peta jarak jaring teritorial yang telah ada guna memudahkan aparat Kodim dalam memonitor perkembangan di wilayah binaannya. Peta jarak jaring teritorial yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan aparat komando kewilayahan, tidak hanya sebatas mitra formal saja tetapi juga mitra informal sehingga mencakup semua lapisan di masyarakat. Selain itu, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi tidak hanya mampu memperluas peta jarak jaring teritorial tetapi juga membina memeliharanya sehingga mitra-mitra tersebut senantiasa memberikan informasi secara berkelanjutan guna mendeteksi dan mencegah secara dini paham-paham ataupun aksi-aksi radikalisme di masyarakat.;

(4) Membuat Standard Operating Procedure (SOP) tentang Komunikasi sosial dalam mengatasi Paham radikalisme.

Standard Operating Procedure (SOP) pada dasarnya merupakan pedoman yang di dalamnya berisi prosedur-prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwasanya setiap keputusan, langkah, atau tindakan, serta penggunaan dari fasilitas-fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam sebuah organisasi, telah berjalan dengan efektif, tetap, standar dan juga sistematis. Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) tentang Komunikasi sosial dalam mengatasi paham radikalisme akan memungkinkan menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut karena Standard Operating Procedure (SOP) menjadi pedoman atau acuan atas pelaksanaan kegiatan komunikasi sosial baik yang sifatnya operasional maupun administratif. Dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi sosial dapat mengatur kegiatan-kegiatan dengan lebih efektif. Sebagai tuntunan kegiatan komunikasi sosial dalam mengatasi paham radikalisme, Standard Operating Procedure (SOP) harus dapat dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan aparat Komando Kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam kondisi apapun. Oleh karena perlu adanya pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi sosial guna menjadi pedoman dalam penerapannya terutama dalam mendeteksi dan mencegah secara dini paham-paham dan aksi radikalisme; (5) Membangun kesadaran bela negara masyarakat. Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membela negara harus terus dilakukan agar terbangun semangat patriotisme di masyarakat. Arahkan masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal serta memiliki kesadaran dan mengetahui kemana harus bertanya bila mendengar atau menerima suatu informasi tentang berbagai hal. Dengan kemampuan komunikasi sosial yang baik, Babinsa diharapkan mampu berkomunikasi secara harmonis dengan seluruh komponen bangsa untuk menggugah, mendorong dan mengajak masyarakat guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan terciptanya keamanan di lingkungan masyarakat. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dibina dan ditingkatkan komunikasi melalui pendekatan terhadap masyarakat dimana dalam pelaksanaannya Babinsa harus dapat menyelami, memahami dan mengenal lebih dekat terhadap watak dan karakter masyarakat disekitarnya. Dengan memahami hal tersebut pelaksanaan komunikasi sosial untuk mendapatkan berbagai informasi/keterangan dapat berjalan lancar dan menimbulkan interaksi positif antara Babinsa dan masyarakat; (6) Meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat. Cinta tanah air merupakan salah satu dasar dari bela negara.

Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara, untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Sebagai salah satu dasar dari bela negara, cinta tanah air diimplementasikan pada tiga lingkungan yaitu lingkungan pendidikan (formal), lingkungan pemukiman (informal) dan lingkungan pekerjaan (nonformal).

Di lingkungan pendidikan, kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: (a) Kegiatan intrakurikuler, yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti: ceramah, diskusi, demonstrasi, pemecahan masalah, belajar sambil bermain, dan lain sebagainya. (b) Kegiatan ekstrakurikuler, seperti: pramukha, palang merah remaja, kesenian, bahasa, pencinta alam, dan lain sebagainya. (c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat/kemasyarakatan, seperti: unjuk kerja atau trip observation ke desa atau masyarakat sekitarnya, memperingati hari besar nasional bersama masyarakat; (d) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, seperti: membangun lapangan olah raga, tempat ibadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, konseling, dan lain sebagainya.

Di lingkungan pekerjaan, kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: (a) Kegiatan pendidikan yang terencana di lingkungan pekerjaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembekalan pimpinan atau jam komandan, coffee morning, presentasi rencana program oleh tiap-tiap unit kerja secara bergiliran, dan pembentukan organisasi belajar lainnya yang dibentuk di lingkungan kerja tersebut (kelompok kerja, kepanitiaan khusus dan lain sebagainya). (b) Kegiatan tambahan yang menunjang semangat kerja seperti olah raga bersama, rekreasi, siraman rohani, dan lain sebagainya. (c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti menolong korban bencana alam, kunjungan ke panti asuhan dan anak yatim piatu, donor darah, bakti sosial dan lain sebagainya. (d) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, seperti pembangunan tempat ibadah, lapangan olah raga, fitness centre, balai pengobatan, taman, pengamanan dan lain sebagainya. Di lingkungan pemukiman, kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: (a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat. (b) Kegiatan yang menunjang integrasi masyarakat, seperti gotong royong, olah raga, rekreasi, siraman rohani, pentas seni budaya dan lain sebagainya. (c) Kegiatan solidaritas sosial, seperti mengunjungi tetangga yang sakit, musibah kematian, kebakaran, membantu tetangga yang kesusahan, dan lain sebagainya. (d) Kegiatan penciptaan kondisi lingkungan pemukiman yang kondusif, seperti membentuk perkumpulan/forum, membangun lapangan olah raga, membangun rumah ibadah, Siskamling dan lain sebagainya. Melalui komunikasi sosial, aparat komando kewilayahan jajaran Kodam III/Siliwangi berusaha menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat baik lingkungan pendidikan, pekerjaan maupun lingkungan pemukiman sehingga rasa cinta tanah air tersebut menjadi modal yang penting guna mengantisipasi munculnya paham-paham dan aksi-aksi radikalisme yang muncul.

Sinergitas Stakeholder di wilayah dalam penanganan radikalisme.

Guna mewujudkan kondisi di wilayah yang aman bagi masyarakat maka dalam penanganan permasalahan yang ada di wilayah dimana dalam hal ini pemerintah daerah

yang berada di wilayah sebagai koordinator stakeholder memiliki peran yang sangat vital dimana dalam hal ini pemerintah daerah sebagai leader dari stakeholder yang ada harus mampu mengajak dan bersinergi dalam membantu penanganan permasalahan yang ada di wilayah. Dimana dalam pelaksanaan koordinasi dalam hal teknis maupun aplikasi di lapangan tidak mudah karena dihadapkan dengan tingkat permasalahan maupun kondisi di wilayah yang berbeda-beda. Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah seyogyanya pemerintah daerah harus bisa mengajak stakeholder yang ada untuk bekerja sama di wilayahnya. Namun hal tersebut tergantung dari instansi atau pemerintah daerah setempat maupun kebijakan dari pimpinan di daerah tersebut. Khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan radikalisme diperlukan kerja sama antar stakeholder yang ada di wilayah dimana dalam penanganan permasalahan ini begitu kompleks karena dimulai dari permasalahan ideologi, agama maupun permasalahan ekonomi. Dengan mengutamakan penanganan yang dilaksanakan secara bersama-sama atau bersinergi antar stakeholder yang ada di wilayah baik TNI, Kepolisian, Kesbangpol maupun BNPT maka persoalan-persoalan yang menjadi pangkal persoalan radikalisme tersebut dapat diurai satu-persatu serta penanganan radikalisme dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari masing-masing instansi dapat tercapai demi kelangsungan hidup bermasyarakat.

Namun hal tersebut membutuhkan pemahaman dan pengertian dari unsur pimpinan dimana masing-masing stakeholder tersebut memiliki anggaran dalam penanganan radikalisme, dimana dalam hal ini khususnya TNI belum memiliki anggaran khusus untuk penanganan radikalisme. Dengan demikian agar tujuan dari stakeholder tersebut dapat tercapai demi tujuan bersama maka penanganan radikalisme di wilayah harus dilaksanakan secara bersama-sama atau bersinergi sehingga dalam penanganan radikalisme tidak dilaksanakan secara sektoral atau masing-masing sehingga dampak saat ini penanganan radikalisme cenderung dilaksanakan masing-masing sehingga hasil yang dicapai belum maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penanganan radikalisme di wilayah harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi antar stakeholder baik TNI, Kepolisian, Kesbangpol maupun BNPT sehingga dalam penanganan radikalisme dampaknya atau hasil akan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada perasaan was-was karena paham radikalisme yang ada dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dalam penanganan radikalisme harus dilaksanakan secara bersama-sama atau bersinergi di lapangan sehingga hasil yang dicapai lebih optimal serta menunjang dalam pelaksanaan komunikasi sosial aparat komando kewilayahan dan dampaknya bias dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Komunikasi sosial TNI dengan stakeholder terkait cukup bagus dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta dalam rangka membantu pemerintah

melaksanakan program programnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Dalam kegiatan sehari hari aparat kewilayahan, diwilayah binaannya selalu bersama-sama bersinergi dalam rangka membantu kesejahteraan warga masyarakat, mensukseskan program program pemerintah serta menciptakan situasi yang harmonis. Contoh sinergitas komunikasi sosial dengan stakeholder sebagai berikut:

- 1) Dalam penanganan Covid-19 aparat kewilayahan bahu membahu bersama-sama dengan kepolisian, pemerintah daerah dan tenaga Kesehatan bersama sama mengajak warga masyarakat untuk senantiasa warga masyarakat mematuhi protokol Kesehatan dan menghimbau warga untuk melaksanakan vaksinasi untuk mencegah warga masyarakat terinfeksi Covid-19.
- 2) Patroli bersama sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah binaannya.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi sosial TNI di wilayah Kodam III/Siliwangi menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi radikalisme. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme radikalisme dan tidak adanya partisipasi dalam inisiatif deradikalisasi yang diinisiasi oleh BNPT. Pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh pertimbangan sumber daya, seperti personil, peralatan, dan sumber daya keuangan. Meningkatkan kemampuan struktur komando daerah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur komunikasi sosial TNI sangat penting untuk keberhasilan upaya deradikalisasi. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara komando daerah dan mitra terkait dalam menangani radikalisme. Untuk melaksanakan tugas aparat komando daerah secara efektif di lapangan, perlu adanya kesadaran yang komprehensif tentang budaya lokal dan mengambil sikap yang tepat. Pada akhirnya, sangat penting untuk membuat Prosedur Operasi Standar (SOP) yang melibatkan semua pihak terkait di daerah untuk meningkatkan identifikasi dan pencegahan radikalisme secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzaikhan, M., Idani, F., & Muliani, M. (2023). Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 17–34.
- Ardiyansah, A. (2017). Mencermati Dinamika Radikalisme, Ekstrimisme, dan Komunisme di Media Sosial. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/akmalardiansyah/58773584707a61f30c3b580b/mencermati-dinamika-radikalisme-ekstrimisme-dan-komunisme-di-media-sosial>

- Aziz, A. (2016). Memperkuat kebijakan negara dalam penanggulangan radikalisme di lembaga pendidikan. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 12(1), 29–58. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>
- Hamdanah, H., Anshari, M. R., Pertiwi, E. M., & Sari, L. W. (2022). *Pembinaan Toleransi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. K-Media.
- Ladjima, F., Lating, A., & Usman, S. (2023). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 3(1), 59–68. <https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.1540>
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 149–168. <https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2882>
- Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi (Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 234–252. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108>
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisy, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Poespitohadi, W., Wiyani, W., Arinto, S. P., Suroso, T. E., Mulyo, P. D., & Agustina, L. (2023). Sinergitas TNI dengan Pemangku Kepentingan terkait dalam Kebijakan Deradikalisasi di Wilayah Propinsi Jawa Timur. *Media Bina Ilmiah*, 17(11), 2689–2700.
- Ramli, R. (2022). Kontribusi Studi Kawasan Bagi Paradigma Keilmuan Acehnologi. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1–20. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v13i1.683>
- Sihalolo, M. J. (2017). Hadi Bicara soal Proxy War, Terorisme, hingga Cyber Warfare. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/467020-hadi-bicara-soal-proxy-war-terorisme-hingga-cyber-warfare>
- Siregar, R. S., Wahyudi, B., & Simatupang, H. (2019). Implementasi Komunikasi Sosisal Kodim 0204/DS dalam Mencegah RADIKALISME di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.565>
- Wangsajaya, Y. (2023). *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxi War*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Yulianto, A. (2017). Menangkal Radikalisme di Asia Tenggara. *Republika*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/ouf7b2/menangkal-radikalisme-di-asia-tenggara>